



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SERTA PANITIA PERANCANG UU DPD RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PROLEGNAS TAHUN 2015-2019 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

Tanggal 6 Februari 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Jumát, 6 Februari 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB – 16.40 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta.
A c a r a	: Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 22 orang, ijin 3 dari 35 orang Anggota Badan Legislasi; 6 orang Anggota PPUU DPD RI; dan Kepala BPHN beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja(Panja) Badan Legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memimpin pembahasan usulan RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap usulan RUU dari DPR, Pemerintah, dan DPD RI mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota Panja, Pemerintah (Kepala BPHN), Anggota PPUU DPD RI sebagai berikut:

1. Diusulkan agar RUU tentang Etika Penyelenggara Negara dan RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan dijadikan satu dan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang juga diusulkan oleh DPD RI dengan judul RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
3. Terhadap usulan RUU tentang Tabungan Haji hendaknya substansinya dimasukkan dalam RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.
4. Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 hendaknya mendasarkan pada 153 usulan RUU yang sudah dikelompokkan berdasarkan bidang kerja komisi, yaitu:
 - a. Komisi I : 12 RUU;
 - b. Komisi II : 18 RUU;
 - c. Komisi III : 31 RUU;
 - d. Komisi IV : 12 RUU;
 - e. Komisi V : 7 RUU;
 - f. Komisi VI : 11 RUU;
 - g. Komisi VII : 7 RUU;
 - h. Komisi VIII : 12 RUU;
 - i. Komisi IX : 11 RUU;
 - j. Komisi X : 5 RUU; dan
 - k. Komisi XI : 27 RUU.
5. Diusulkan agar beberapa RUU dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019, yaitu:
 - a. RUU tentang Sistem Pengupahan;
 - b. RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. RUU tentang Hak-hak Pasien atau RUU tentang Perlindungan Pasien;
 - d. RUU tentang Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah;
 - e. RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria;
 - f. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
 - g. RUU tentang Penjaminan Polis; dan
 - h. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Diusulkan agar RUU tentang Peradilan Keluarga dimasukkan dalam substansi RUU tentang Perkawinan dan masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019.
7. Diusulkan agar usulan RUU yang judul dan substansinya ada kemiripan atau beririsan sebaiknya di gabungkan menjadi satu RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.
8. Pemerintah mengusulkan RUU baru yaitu RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dimasukkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dengan pertimbangan saat ini sering terjadi data pribadi disalahgunakan oleh pihak Perbankan atau pihak yang tidak berwenang.
9. Perlu dipertimbangkan kembali apakah sebaiknya pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi tidak sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah saja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan Panitia Perancang UU DPD RI menyetujui/menyepakati

1. Usulan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menunggu tanggapan/pandangan fraksi-fraksi.
2. Jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 sebanyak 160 (seratus enam puluh) RUU.
3. Jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 sebanyak 37 RUU yang terdiri dari 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD RI.

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB

Jakarta, 6 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS,**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSi.
NIP. 197104031996032001.